

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Lingkungan

Definisi lingkungan menurut Suparmoko (2013), diartikan sebagai kombinasi antara kelembagaan dan kondisi fisik. Dimana bagian dalam kelembagaan dari lingkungan merupakan suatu keputusan yang diciptakan oleh manusia tentang bagaimana cara mengolah lingkungan fisik. Sedangkan lingkungan fisik atau kondisi fisik didalamnya mencakup kondisi sumber daya alam seperti air, tanah, udara, energi surya, mineral serta flora dan fauna yang ada baik diatas tanah maupun di dalam lautan.

Undang-undang No 4 tahun 1982 mengartikan “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Unsur abiotik (fisik): yaitu unsur lingkungan hidup yang didalamnya terdiri dari benda-benda tidak hidup, misalnya air, tanah, udara dan lain-lain.

- b. Unsur biotik (hayati): yaitu unsur lingkungan hidup yang didalamnya terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan.
- c. Unsur sosial budaya: yaitu unsur yang didalamnya mencakup lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia sedemikian rupa seperti gagasan, perilaku sebagai makhluk sosial, serta sistem nilai yang diterapkan.

Peran lingkungan fisik sangat besar terhadap kelangsungan hidup seluruh kehidupan di bumi. Keseimbangan lingkungan fisik harus dijaga apabila ingin kehidupan di muka bumi berlangsung secara wajar dan baik. Lingkungan fisik yang rusak dapat mengakibatkan banyak bencana yang dapat mengancam keselamatan manusia seperti bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan lain sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu:

- a. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan angin puting beliung.
- b. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia seperti pencemaran, tanah longsor, banjir dan sebagainya.

Beberapa kerusakan lain akibat ulah manusia yaitu pembuangan sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang berdampak negatif pada kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain (Ahdiyana, 2010).

2. Ekosistem

Ekosistem (Zoer'aini, 2007) merupakan kesatuan dari suatu komunitas dengan lingkungannya dimana di dalamnya terjadi interaksi atau tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas. Dalam suatu ekosistem terdapat serangkaian spesies tumbuhan, hewan, energi yang menjadi sumber kekuatan serta berbagai macam bentuk materi yang melakukan siklus dalam sistem itu. Terdapat beberapa komponen apabila ditinjau dari segi struktur dasarnya (Indriyanto, 2006), yaitu:

- a. Komponen abiotik (benda mati) yang terdiri dari air, udara, tanah dan lain sebagainya.
- b. Komponen produsen atau pada umumnya berupa tumbuhan hijau yang merupakan organisme autotrofik (menyediakan makanan sendiri).
- c. Komponen konsumen, yaitu organisme heterotrofik (memakan organisme lain) misalnya binatang dan manusia.
- d. Komponen pengurai, yaitu mikroorganisme yang hidupnya bergantung pada bahan organik yang dihasilkan dari organisme yang sudah mati, yang pada umumnya terdiri dari jamur dan bakteri.

Populasi, komunitas, organisme dan ekosistem merupakan sebagian dari tingkatan organisasi makhluk hidup, sehingga tipe dan karakteristik dari populasi, komunitas dan organisme akan mempengaruhi tipe dan karakteristik dari ekosistem. Informasi mengenai keanekaragaman hayati dapat diperoleh dari tipe dan karakteristik ekosistem.

3. Hutan Mangrove

Daerah pesisir merupakan tempat bertemunya antara laut dan darat. Di wilayah muara sungai dan daerah pesisir pantai terdapat hutan mangrove atau hutan payau yang biasa ditemukan. Mangrove banyak dijumpai pada wilayah pesisir dengan daerah yang landai dan terlindungi dari deburan ombak. Pertumbuhan mangrove tidak optimal apabila tidak terdapat muara sungai pada pesisir pantai. Wilayah dengan ombak besar dan pasang surut yang kuat akan menyulitkan pertumbuhan mangrove karena kondisi ini tidak memungkinkan terjadi pengendapan lumpur dan substrak yang diperlukan dalam pertumbuhannya.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015) hutan mangrove merupakan vegetasi pantai tropis yang khas, berkembang dan tumbuh pada daerah pasang surut terutama di muara sungai, laguna dan daerah pantai yang terlindung dengan lumpur berpasir. Berbagai macam material/barang yang dihasilkan oleh hutan mangrove yang berupa kayu, daun, hingga jasa lingkungan seperti pengendalian abrasi, intrusi air laut dan lain sebagainya yang memberikan manfaat secara ekonomis dan ekologi bagi kelangsungan hidup ekosistem lain.

Adapun fungsi ekosistem mangrove secara garis besar menurut (Kusmana, 2009), yaitu:

- a. Memperbaiki kualitas air karena pohon mangrove menyerap polutan yang terdapat pada air.

- b. Mengendalikan intrusi air laut dengan mengurangi kadar garam.
- c. Melindungi garis pantai dari terjangan gelombang yang menyebabkan abrasi.
- d. Sebagai tempat hidup biota lain.

Adapun fungsi lain dari mangrove dari sisi sumber daya, yaitu:

- a. Fauna darat dan laut seperti bekantan, burung, mamalia, serangga dan lain sebagainya.
- b. Flora dari jenis-jenis mangrove itu sendiri.

Ekosistem hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai suaka margasatwa burung-burung di pantai, pelestarian pantai, dan pemeliharaan berbagai macam biota lain sehubungan dengan perlunya perlindungan dan pelestarian alam. Dilihat dari peranan dan manfaat yang beraneka macam, hutan mangrove memiliki andil besar dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia sehingga hutan mangrove sangat berpotensi terhadap kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif bagi ekosistem mangrove (Masrifah, 2002).

4. Barang Publik

Menurut Suparmoko (2002), pada lingkungan mempunyai sifat sebagai barang milik umum, khususnya dalam hal pencemaran dan pembuangan limbah. Barang publik merupakan barang yang dapat dipergunakan maupun dikonsumsi oleh siapapun tanpa ada kewajiban untuk membayar. Hampir tidak ada perusahaan atau individu bersedia

mengurangi limbah atau mencegah pencemaran apabila tidak ada tekanan dari masyarakat serta aturan dari pemerintah. Limbah atau sampah merupakan barang publik yang mau tidak mau atau suka tidak suka, akan memberikan dampak pada masyarakat meskipun tidak melakukan pembayaran untuk menolak atau menerima pencemaran. Dalam ilmu ekonomi, barang publik merupakan barang yang apabila dikonsumsi oleh satu individu, maka tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang tersebut (Prasetya, 2012). Adapun sifat dari barang publik yang terkait dengan penggunaannya yaitu:

a. Non-rivalry

Hal ini berarti dimana pemanfaatan satu individu tidak akan mengurangi kesempatan pengguna lain untuk mengkonsumsi barang tersebut.

b. Non-excludable

Hal ini berarti bahwa tidak mungkin dapat dicegah penggunaan atau konsumsi seseorang dalam memperoleh manfaat dari barang publik tersebut.

Pada teori Bowen barang publik didefinisikan sebagai barang dimana pengecualian tidak bisa ditentukan, yaitu apabila barang publik sudah tersedia maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan untuk memanfaatkan barang tersebut. Adapun teori menurut Pigou menjelaskan bahwa barang publik seharusnya disediakan sampai suatu tingkat kepuasan marginal barang publik sama dengan ketidakpuasan

marginal terhadap pajak dari penyediaan barang publik tersebut dari pemerintah.

5. Kesiediaan Membayar (WTP) dan Kesiediaan Menerima Kompensasi (WTA)

Nilai ekonomi dapat diartikan sebagai pengukuran dimana jumlah maksimum seseorang bersedia mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal, hal ini dapat disebut sebagai kesiediaan seseorang untuk membayar (*willingness to pay*) terhadap perbaikan suatu lingkungan. Pengukuran nilai ekonomi dapat juga dilakukan dengan pengukuran WTA (*willingness to accept*) yaitu kesiediaan seseorang untuk menerima kompensasi terhadap penurunan kualitas lingkungan disekitarnya. Pada umumnya kesiediaan membayar lebih sering ditemui dibandingkan kesiediaan menerima kompensasi karena kesiediaan menerima kompensasi bukan merupakan pengukuran berdasarkan insentif, oleh sebab itu kurang tepat untuk menjadi studi kasus yang berdasarkan perilaku manusia (Mubarok dan Ciptomulyono, 2012).

6. Valuasi Ekonomi

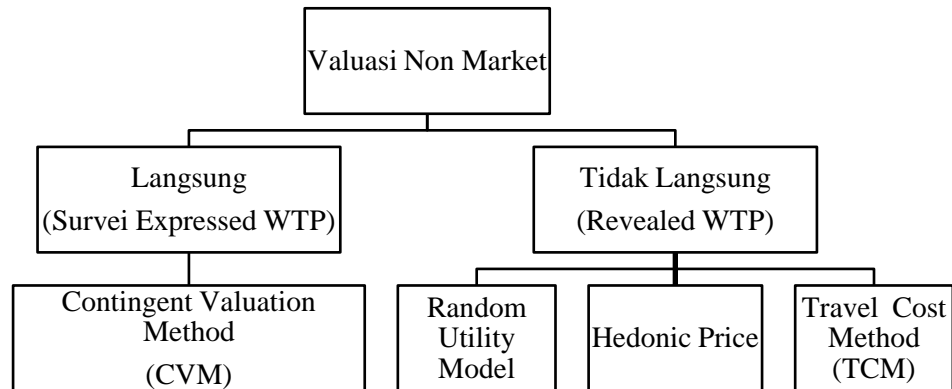
Kajian mengenai valuasi ekonomi membahas tentang masalah nilai lingkungan atau harga lingkungan. Tujuan dari valuasi ekonomi adalah untuk memberikan nilai ekonomi terhadap sumber daya yang digunakan sesuai dengan nilai riil dari sudut pandang masyarakat. Valuasi lingkungan hidup merupakan suatu bagian integral dan prioritas sektoral

dalam mendeterminasi keseimbangan antara konservasi dan pembangunan (Muhammad Alfian 2004).

Menurut Fadhilah. (2015) valuasi ekonomi adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam menentukan nilai kuantitatif terhadap suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh lingkungan dan sumber daya alam terlepas dari nilai pasar baik tersedia atau tidak. Berdasarkan analisis non-pasar (*non-market*) valuasi ekonomi dapat digunakan dalam hal pemberian nilai moneter pada produk barang dan jasa yang tidak dipasarkan.

Kementrian Lingkungan Hidup (2012) pada konsep metode valuasi ekonomi, penetapan nilai ekonomi kerusakan lingkungan maupun nilai ekonomi total yaitu dengan menggunakan pendekatan harga pasar dan pendekatan harga non pasar. Pada harga pasar dapat dilakukan dengan pendekatan produktivitas, pendekatan modal manusia (*human capital*) atau pendekatan nilai hilang (*foregone earning*) dan pendekatan biaya kesempatan (*opportunity cost*). Adapun beberapa pendekatan non pasar dapat menggunakan metode biaya perjalanan (*travel cost*), metode nilai hedonis (*hedonic pricing*), metode kesediaan menerima ganti rugi atau kesediaan membayar (*contingent valuation*) dan metode *benefit transfer*.

Valuasi ekonomi barang non pasar (*non market goods*) yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Fauzi (2004)

Gambar 2.1 Metode Valuasi Ekonomi Non-Pasar

Pada Gambar 2.1 diatas menerangkan bahwa pilihan metode valuasi ekonomi yang dapat diterapkan ke dalam perhitungan nilai ekonomi kerusakan lingkungan. Fungsi dan manfaat lingkungan yang terganggu dapat mempengaruhi pemilihan metode perhitungan valuasi ekonomi. Pendekatan harga pasar dan non pasar dapat digunakan untuk menentukan nilai ekonomi total.

Valuasi ekonomi yang tidak dapat dipasarkan (*non market goods*) terbagi menjadi dua yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok manfaat tidak langsung adalah :

a. *Travel Cost Method*

Travel Cost Method (TCM) merupakan metode yang digunakan untuk menilai ekonomi secara tidak langsung. Metode

ini telah banyak dipergunakan dalam menganalisis suatu permintaan terhadap rekreasi dialam terbuka. TCM pada prinsipnya digunakan untuk mengkaji biaya yang dikeluarkan oleh setiap individu untuk megunjungi tempat-tempat rekreasi.

b. *Random Utility Model*

Model ini terfokus pada pilihan yang berkaitan dengan alternatif lokasi wisata. Tidak jauh beda dengan TCM, namun *random utility model* tidak hanya terpaku pada jumlah kunjungan rekreasi pada waktu tertentu akan tetapi pada saat faktor-faktor pengganti lokasi tersedia maka nilai dari karakteristik suatu alternatif ke lokasi lain dapat diukur.

c. *Hedonic Pricing*

Pendekatan nilai hedonis merupakan suatu teknik penilaian terhadap lingkungan yang didasarkan atas perbedaan harga sewa rumah atau harga sewa lahan yang diasumsikan adanya perbedaan kualitas lingkungan. Secara tidak langsung pendekatan ini digunakan untuk menduga nilai perubahan kualitas lingkungan agar nilai kesanggupan membayar (*willingness to pay*) dapat ditentukan.

Sedangkan yang termasuk dalam kelompok manfaat langsung adalah *Contingent Valuation Method* (CVM) dimana informasi yang tergantung dari hipotesis yang dibangun biasanya disebut dengan metode *contingent* (tergantung). Dalam mengukur nilai pasif (non-

pemanfaatan) sumber daya alam sering menggunakan pendekatan *Contingent Valuation Method* (CVM) dapat juga disebut dengan nilai keberadaan. Metode CVM pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui keinginan membayar (*willingness to pay* atau WTP) dari masyarakat, dan keinginan menerima (*willingness to accept* atau WTA) apabila terjadi kerusakan dan maupun pemeliharaan sumber daya alam akibat perubahan sumber daya alam dan lingkungan.

Kelebihan dari metode CVM yang sering ditemukan yaitu penggunaannya dalam berbagai penelitian dalam mengestimasi manfaat barang pada suatu lingkungan disekitar masyarakat. Metode ini diaplikasikan pada kebanyakan konteks kebijakan lingkungan, dan apabila dibandingkan dengan teknik lain, CVM memiliki keunggulan untuk mengestimasi *non use value* (Fadilah, 2015).

7. Kesiediaan Membayar (*Willingness to Pay*)

Willingness to Pay (WTP) atau dapat disebut kesiediaan untuk membayar yaitu kesiediaan orang untuk membayar pada kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumber daya alam dengan tujuan memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak (Simanjuntak, 2009).

Terdapat tiga cara untuk mengestimasi WTP, yaitu:

- a. Menanyakan langsung kepada responden apakah mereka bersedia untuk membayar.
- b. Mengamati perilaku responden ketika membelanjakan uangnya.

- c. Mengamati perilaku seseorang untuk memperoleh suatu barang tanpa kerugian.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini antara lain:

1. Adekunle dan Agbaje (2011) telah melakukan penelitian yang berjudul “*Public willingness to pay for ecosystem service function of a peri-urban forest near Abeokuta, Ogun State, Nigeria*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi *willingness to pay* masyarakat untuk layanan pemeliharaan ekosistem hutan pinggiran kota yaitu hutan lindung Arakanga (AFR) sebagai fokusnya. Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah *Contingen Valuation Method* (CVM), dengan menggunakan prosedur *multistage sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 46% dari total responden bersedia membayar dengan indikasi bahwa mereka mendapat lebih banyak keuntungan dari layanan yang diberikan oleh hutan karena lokasi yang berdekatan. Rata-rata WTP untuk jasa lingkungan di daerah penelitian diseluruh strata sosial ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. WTP oleh laki-laki yaitu (N164,7) dan perempuan (N153,4), ini karena manfaat yang diperoleh berbeda tergantung akses pemanfaatan hutan yang berbeda pula.

Status pernikahan menunjukkan bahwa mereka yang telah menikah memiliki rata-rata WTP yang lebih tinggi dibandingkan yang

belum menikah. Penghasilan yang tinggi juga memiliki pengaruh rata-rata WTP yang tinggi (N132,5) yaitu mereka yang berpenghasilan antara (N20,000) dan (N50,000) per bulan. Responden dengan pendidikan yang tinggi mengindikasikan bahwa pendidikan formal dapat meningkatkan kesediaan membayar seseorang untuk memberikan kontribusi terhadap jasa lingkungan ekosistem hutan dengan rata-rata WTP (N200).

2. Bosold, dkk. (2008) telah melakukan penelitian dengan judul "*Factors Influencing Community Participation in Mangrove Restoration: A Contingent Valuation Analysis*". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat WTP rumah tangga yang berkontribusi dalam restorasi mangrove dengan masyarakat yang hidup di pesisir India bagian barat yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu: petani, nelayan wanita, dan nelayan pria. Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah CVM dengan model kombinasi dan model individu.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam restorasi mangrove masing-masing kelompok bersedia berkontribusi, dengan menggunakan uang maupun tenaga. Ukuran rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *willingness to participate*, namun variabel usia dan pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dalam kegiatan restorasi mangrove, sebesar 55% nelayan pria dan 70% nelayan wanita bersedia mencurahkan sejumlah jam kerja untuk kegiatan ini. Sedangkan para petani memiliki jumlah tertinggi dalam tingkat

willingness to participate dengan rata-rata (626 Rupe) per tahun. *Weighted WTP* rumah tangga dengan model kombinasi sebesar (408 Rupe) sedangkan dengan model individu sebesar (466 Rupe).

3. Tuan, dkk. (2014) telah meneliti tentang “*Using Contingent Valuation Method to Estimate the WTP for Mangrove Restoration Under the Context of Climate Change: A Case Study of Thi Nai Lagoon, Quy Nhon City, Vietnam*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi WTP masyarakat dalam hal restorasi mangrove di Thi Nai Lagoon, Quy Nhon City, Vietnam. Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini yaitu CVM, menggunakan metode estimasi parametik dan non-parametik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 72% dengan menggunakan estimasi parametik, responden bersedia untuk membayar kegiatan restorasi mangrove dengan nilai rata-rata WTP (VND 131.670) per rumah tangga per tahun. Masyarakat menyadari pentingnya nilai yang dihasilkan oleh mangrove. Berdasarkan estimasi non-parametik nilai rata-rata WTP responden sebesar (VND 146,700) per rumah tangga per tahun. Total nilai dari estimasi mangrove yaitu (VND 15,5 Miliar).

4. Fadhilah (2015) dengan penelitian yang berjudul “Restorasi Ekosistem Mangrove di Kabupaten Kendal”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap restorasi ekosistem mangrove di Kabupaten Kendal, mengidentifikasi kerusakan ekosistem mangrove di Kabupaten Kendal, mengestimasi kesediaan membayar oleh

masyarakat terhadap restorasi ekosistem mangrove di Kabupaten Kendal serta merancang upaya restorasi ekosistem mangrove di Kabupaten Kendal. Dalam analisis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, *Contingent Valuation Method*, dan *indepth interview*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kerusakan ekosistem mangrove yang termasuk dalam kategori pohon dan *sapling* tergolong baik, dan untuk kategori *seeding* tergolong sedang. Nilai rata-rata WTP yang dihasilkan sebesar (Rp 18.000) per rumah tangga per tahun dengan nilai total WTP (Rp 993.174.000) per tahun.

5. Nasution, (2015) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Willingness to Pay* Masyarakat terhadap Mata Air Aek Arnga di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai ekonomi pembayaran jasa lingkungan Mata Air Aek Arnga dan menganalisis faktor yang mempengaruhi nilai WTP responden terhadap Mata Air Aek Arnga. Dalam penelitian ini menggunakan metode CVM dengan teknik *convenience sampling* (teknik kesesuaian).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata WTP adalah (Rp 109,6) per kepala keluarga per hari atau nilai total WTP adalah (Rp 14.692,83) per hari. Rata-rata pendapatan rumah tangga berpengaruh positif signifikan, variabel penilaian jumlah pengguna air berpengaruh signifikan terhadap nilai WTP, begitu pula dengan jumlah kebutuhan air yaitu positif signifikan yang berarti bahwa semakin besar

kebutuhan air yang responden dapatkan dari mata air tersebut maka semakin tinggi pula nilai rata-rata WTP.

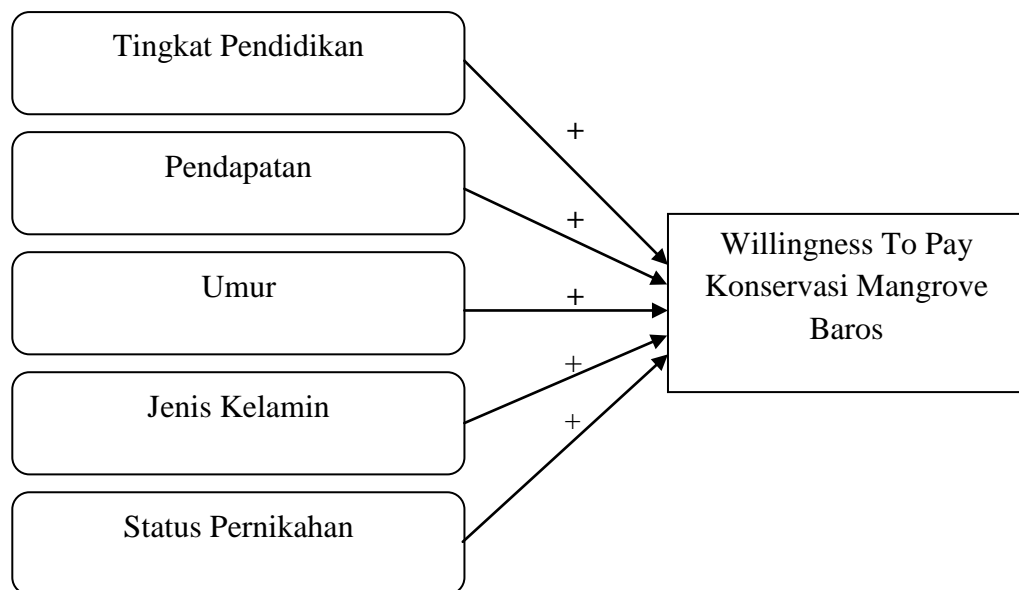
C. Kerangka Penelitian

Sumber daya alam merupakan sesuatu yang terdapat di dalam maupun di luar bumi yang masih potensial dalam penggunaannya. Sumber daya alam akan semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam memerlukan suatu kebijaksanaan dimana perlu dilaksanakan kebijakan sumber daya alam dan lingkungan yang rasional dan bertanggung jawab (Suparmoko, 2013). Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan kelestariannya dimasa yang akan datang. Salah satu sumber daya yang potensial yaitu hutan mangrove, selain mencegah bencana seperti abrasi, hutan mangrove juga menjadi tempat tinggal biota lain. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk, ekosistem mangrove semakin terancam.

Di Yogyakarta, ekosistem mangrove masih relatif sempit. Ekosistem mangrove di kawasan pantai Baros dalam hal pengembangannya terdapat berbagai kendala. Sampah merupakan salah satu kendala yang menyebabkan rusaknya ekosistem mangrove (jogja.antaranews.com). Maka dari itu pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sekitar kawasan ekosistem mangrove, dinas terkait terus melakukan upaya pengembangan. Salah satu upaya pengembangan kawasan ekosistem mangrove ini adalah dengan melakukan penanaman bibit mangrove. Oleh karena itu, harus ada upaya dalam hal mengkaji kesiapan untuk membayar oleh masyarakat untuk

memperbaiki kawasan ekosistem mangrove yang telah rusak maupun kurang berkembang. Konsep pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada

Gambar 2.2.



Gambar 2.2 : Diagram Kerangka Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah:

1. Jenis kelamin berpengaruh positif terhadap *Willingness To Pay* konservasi ekosistem mangrove.
2. Pendapatan berpengaruh positif terhadap *Willingness To Pay* konservasi ekosistem mangrove.
3. Umur berpengaruh terhadap positif *Willingness To Pay* konservasi ekosistem mangrove.

4. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap *Willingness To Pay* konservasi ekosistem mangrove.
5. Persepsi pentingnya ekosistem mangrove berpengaruh terhadap *Willingness To Pay* konservasi ekosistem mangrove.
6. Status pernikahan berpengaruh positif terhadap *Willingness To Pay* konservasi ekosistem mangrove.